

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 05 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS
 PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

KUESIONER PENILAIAN LOKASI

Untuk Pemerintah Kota/Kabupaten

**BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS
 PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
 (BSPK)**

TAHUN ANGGARAN ...

1) DESA/KELURAHAN	
2) KECAMATAN	
3) KABUPATEN/KOTA	
4) PROVINSI	
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)	UNIT
	TAHUN ANGGARAN ...

Keterangan:

1. Lokasi merupakan lokasi BSPS pada tahun anggaran sebelumnya.
2. Diharapkan masing-masing pemerintah kabupaten/kota mengusulkan maksimal 3 (tiga) lokasi BSPS \geq 100 unit dan mengelompok.

DIISI OLEH,

DIKETAHUI OLEH,

(.....)

(.....)

PEJABAT ESELON III

SEKRETARIS DAERAH ATAU
KEPALA BAPPEDA/DINAS TERKAIT

I. DATA LOKASI				
1.1. ADMINISTRASI				
	a. KELURAHAN <i>(dapat diisi lebih dari 1 kelurahan)</i>	1)		
		2)		
		3)		
	b. KECAMATAN <i>(dapat diisi lebih dari 1 kecamatan)</i>	1)		
		2)		
		3)		
	c. KABUPATEN/KOTA <i>(dicoret salah satu)</i>			
	d. PROVINSI			
	e. STATUS KEPEMILIKAN TANAH		1) MILIK PERSEORANGAN	
			2) DIKUASAI PEMERINTAH	
		3) LAINNYA,.....		
1.2. UMUM				
	a. LUAS	HEKTAR		
	b. JUMLAH RUMAH	UNIT		
	c. JUMLAH PENDUDUK	JIWA		
	d. JUMLAH KEPALA KELUARGA	KK		
	e. DOMINASI PERMUKIMAN <i>(tipologi berdasarkan mata pencaharian)</i>		1) PERMUKIMAN PEKERJA	
		2) PERMUKIMAN NELAYAN		
		3) LAINNYA,.....		
II. KRITERIA LOKASI		KLASIFIKASI	KETERANGAN	
2.1. BENTUK LOKASI		1) MENGELOMPOK <i>(CLUSTER)</i>		
		2) TERPENCAR <i>(SCATTERED)</i>		
2.2. PERUNTUKAN DALAM		1) HUNIAN		

	RTRW KAB./KOTA		2) LAINNYA,.....	
2.3.	BAGIAN DARI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (PENETAPAN PERDA)		1) YA	
			2) DALAM PROSES	
			3) LAINNYA,.....	
2.4.	APAKAH ADA KETERSEDIAAN DANA APBD UNTUK MENGALOKASIKAN KEGIATAN INI?		1) YA	
			2) DALAM PROSES	
			3) LAINNYA,.....	
2.5.	APAKAH PERNAH ADA PROGRAM SERUPA DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH?		1) YA, KEGIATAN.....	
			2) LAINNYA,.....	
2.6.	DALAM PENANGANAN SEJENIS, APAKAH ADA KETERLIBATAN MASYARAKAT?		1) YA, KEGIATAN.....	
			2) LAINNYA,.....	
2.7.	KESEDIAAN UNTUK MENGALOKASIKAN APBD UNTUK MELANJUTKAN PROGRAM (PASCA STIMULAN)?		1) YA, DENGAN PROPORSI..... ...%	
			2) LAINNYA,.....	
2.8.	INTENSITAS KEKUMUHAN			
A.	KEPENDUDUKAN			
1.	TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK			
	1.1. KOTA METROPOLITAN		a. > 750 jiwa/ha	
			b. 700 - 750 jiwa/ha	
			c. 600 - 700 jiwa/ha	
			d. 500 - 600 jiwa/ha	

		e. 250 - 500 jiwa/ha	
1.2. KOTA BESAR		a. > 500 jiwa/ha	
		b. 450 - 500 jiwa/ha	
		c. 350 - 450 jiwa/ha	
		d. 250 - 350 jiwa/ha	
		e. 150 - 250 jiwa/ha	
1.3. KOTA SEDANG		a. > 250 jiwa/ha	
		b. 225 - 250 jiwa/ha	
		c. 200 - 225 jiwa/ha	
		d. 150 - 200 jiwa/ha	
		e. 100 - 150 jiwa/ha	
1.4. KOTA KECIL		a. > 150 jiwa/ha	
		b. 100 - 150 jiwa/ha	
		c. 75 - 100 jiwa/ha	
		d. 50 - 75 jiwa/ha	
		e. 25 - 50 jiwa/ha	
2.	JUMLAH RATA-RATA KK PERRUMAH	a. > 4 KK/rumah	
		b. 4 KK/rumah	
		c. 3 KK/rumah	
		d. 2 KK/rumah	
		e. 1 KK/rumah	
3.	TINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK	a. > 2,5%	
		b. 2,1 - 2,5%	
		c. 1,6 - 2,0%	

			d. 1,0 - 1,5%	
			e. < 1,0%	
B. KONDISI BANGUNAN				
1.	TINGKAT KUALITAS STRUKTUR BANGUNAN (Persentase jumlah rumah semi atau tidak permanen terhadap jumlah rumah total)		a. > 70%	
			b. 51 - 70%	
			c. 31 - 50%	
			d. 11 - 30%	
			e. < 10%	
2.	TINGKAT KEPADATAN BANGUNAN		a. > 200 unit/ha	
			b. 151 - 200 unit/ha	
			c. 101 - 150 unit/ha	
			d. 51 - 100 unit/ha	
			e. < 50 unit/ha	
3.	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH (Persentase jumlah rumah yang rusak terhadap jumlah rumah total)		a. 51 - 70%	
			b. 31 - 50%	
			c. 11 - 30%	
			d. < 10%	
			e. 51 - 70%	
C. KONDISI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS				
1.	TINGKAT PELAYANAN AIR BERSIH (Persentase jumlah KK yang tidak terlayani air bersih terhadap jumlah KK total)		a. > 70%	
			b. 51 - 70%	
			c. 31 - 50%	
			d. 11 - 30%	
			e. < 10%	
2.	KONDISI SANITASI		a. > 70%	

	LINGKUNGAN (Persentase jumlah KK yang tidak menggunakan jamban terhadap jumlah KK total)		b. 51 - 70%	
			c. 31 - 50%	
			d. 11 - 30%	
			e. < 10%	
3.	KONDISI PELAYANAN PERSAMPAHAN (Persentase jumlah KK yang sampahnya belum terlayani terhadap jumlah KK total)		a. > 70%	
			b. 51 - 70%	
			c. 31 - 50%	
			d. 11 - 30%	
			e. < 10%	
4.	KONDISI SALURAN AIR HUJAN/DRAINASE - Jika memiliki drainase, persentase panjang drainase yang tidak lancar atau tersumbat terhadap panjang drainase total - Jika tidak memiliki drainase, persentase luasan air limpasan (<i>run off</i>) terhadap panjang drainase total		a. > 70%	
			b. 51 - 70%	
			c. 31 - 50%	
			d. 11 - 30%	
			e. < 10%	
5.a.	KONDISI JALAN RUSAK BERAT (Presentase panjang jalan rusak berat terhadap panjang jalan total)		a. > 70%	
			b. 51 - 70%	
			c. 31 - 50%	
			d. < 30%	
5.b.	KONDISI JALAN RUSAK SEDANG (Presentase panjang jalan rusak sedang terhadap panjang jalan total)		a. > 70%	
			b. 51 - 70%	
			c. 31 - 50%	
			d. < 30%	
5.c.	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (Presentase panjang		a. > 70%	
			b. 51 - 70%	

	jalan rusak ringan terhadap panjang jalan total)		c. 31 - 50%	
			d. < 30%	
6.	JUMLAH RUANG TERBUKA (Persentase luas ruang terbuka terhadap luas seluruh kawasan perumahan dan permukiman)		a. < 2,5%	
			b. 2,5 - 5%	
			c. 5 - 7,5%	
			d. 7,5 - 10%	
			e. > 10%	
2.9. INTENSITAS PERMASALAHAN SOSIAL KEMASYARAKATAN				
1.	TINGKAT PENDAPATAN (Persentase jumlah penduduk berpenghasilan di bawah upah minimum terhadap jumlah penduduk)		a. > 35%	
			b. 26 - 35%	
			c. 16 - 25%	
			d. 6 - 15%	
			e. < 6%	
2.	TINGKAT PENDIDIKAN (Persentase jumlah penduduk yang tidak tamat wajib belajar 9 tahun terhadap jumlah penduduk)		a. > 15%	
			b. 11 - 15%	
			c. 6 - 10%	
			d. 1 - 5%	
			e. 0%	
3.	TINGKAT KERAWANAN KRIMINAL (Jumlah tindakan kriminal dalam 1 tahun)		a. > 6 kali/tahun	
			b. 5 - 6 kali/tahun	
			c. 3 - 4 kali/tahun	
			d. 1 - 3 kali/tahun	
			e. 0 kali/tahun	
4.	STATUS GIZI BALITA (Presentase jumlah balita yang kurang gizi)		a. > 70%	
			b. 51 - 70%	

	terhadap jumlah keseluruhan balita)		c. 31 - 50%	
			d. 11 - 30%	
			e. < 10%	
5.	ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH (Persentase jumlah penderita demam berdarah dalam setahun terhadap jumlah penduduk)		a. > 20%	
			b. 16 - 20%	
			c. 11 - 15%	
			d. 6 - 10%	
			e. < 5%	
6.	ANGKA KESAKITAN DIARE (Persentase jumlah penderita diare dalam setahun terhadap jumlah penduduk)		a. > 70%	
			b. 51 - 70%	
			c. 31 - 50%	
			d. 11 - 30%	
			e. < 10%	
7.	ANGKA KESAKITAN ISPA (INFEKSI SALURAN PERNAPASAN BAGIAN ATAS) (Persentase jumlah penderita ISPA dalam setahun terhadap jumlah penduduk)		a. > 70%	
			b. 51 - 70%	
			c. 31 - 50%	
			d. 11 - 30%	
			e. < 10%	
8.	FREKUENSI KEBAKARAN		a. > 7 kali/tahun	
			b. 5 - 7 kali/tahun	
			c. 3 - 4 kali/tahun	
			d. 1 - 2 kali/tahun	
			e. 0 kali/tahun	
9.	FREKUENSI BANJIR		a. > 7 kali/tahun	

		b. 5 - 7 kali/tahun	
		c. 3 - 4 kali/tahun	
		d. 1 - 2 kali/tahun	
		e. 0 kali/tahun	
10.	FREKUENSI TANAH LONGSOR/3 TAHUN	a. > 7 kali/3 tahun	
		b. 5 - 7 kali/3 tahun	
		c. 3 - 4 kali/3 tahun	
		d. 1 - 2 kali/3 tahun	
		e. 0 kali/3 tahun	

III. PERTANYAAN

1.	<p>APAKAH LOKASI TERSEBUT SUDAH DITANGANI MELALUI PROGRAM SERUPA, MISALNYA NUSSP (<i>NEIGHBOURHOOD UPGRADING SHELTER SECTOR PROJECT</i>), DST?</p> <p>Jawab:</p> <p>_____</p>
2.	<p>ADAKAH PERMASALAHAN YANG BERPOTENSI DAPAT MENGHAMBAT/MENGACAU KEBERHASILAN PENANGANAN PROGRAM?</p> <p>(<i>Misalnya, adanya permasalahan sengketa lahan</i>)</p> <p>Jawab:</p> <p>_____</p>
3.	<p>BAGAIMANA PERSENTASE PELUANG KEBERHASILAN PROGRAM TERKAIT DENGAN KESIAPAN LOKASI?</p> <p>(<i>Besarnya peluang sukses menjadi motor penggerak keberhasilan program, indikatornya antara lain komitmen pemda, partisipasi masyarakat dan intensitas kekumuhan serta permasalahan sosial kemasyarakatan</i>)</p> <p>Jawab:</p> <p>_____</p>
4.	<p>APAKAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERSEDIA UNTUK MENGELOLA PSU YANG AKAN DIBANGUN?</p> <p>Jawab:</p> <p>a. Jika BERSEDIA, langkah apa yang akan ditempuh?</p> <p>_____</p> <p>b. Jika TIDAK BERSEDIA, (<i>kepastian pengelolaan menjadi syarat mutlak agar PSU dapat bermanfaat</i>)</p> <p>_____</p>
5.	<p>APAKAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERSEDIA MENGALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK KEBERLANJUTAN KEGIATAN?</p>

	<p>Jawab:</p> <p>c. Jika BERSEDIA, langkah apa yang akan ditempuh?</p> <p>_____</p> <p>d. Jika TIDAK BERSEDIA,</p> <p>_____</p>
6.	<p>APAKAH DI LOKASI SUDAH ADA LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIKEMBANGKAN ATAU DIMANFAATKAN UNTUK BERFUNGSI MENJADI PENGELOLA PSU YANG AKAN DIBANGUN?</p> <p>Jawab:</p> <p>a. Jika ADA, apakah saat ini lembaga tersebut masih aktif dan menangani kegiatan apa?</p> <p>_____</p> <p>b. Jika TIDAK ADA, (agar didiskusikan dengan pemerintah daerah setempat agar memanfaatkan organisasi masyarakat yang ada untuk dibentuk sebagai Badan Pengelola)</p> <p>_____</p>
7.	<p>BAGAIMANAKAH KESIAPAN LAHAN DI LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PSU BSPK? (Kesiapan lahan menjadi prasyarat utama untuk mengusulkan lokasi BSPK, mengingat komponen PSU yang akan dibangun membutuhkan lahan)</p> <p>Jawab:</p> <p>a. Jika SIAP, bagaimana status kepemilikannya?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>b. Belum, tetapi siap untuk ditangani pada TA....., karena _____</p> <p>_____</p>

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

DJAN FARIDZ

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN
KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH

FORM A

KOP PEMERINTAH PROVINSI

No. :
 Lampiran :

Kepada Yth.
 Menteri Perumahan Rakyat
 Gedung Kementerian Perumahan Rakyat
 Jalan Raden Patah I No.1
 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Perihal : Usulan Pemerintah Provinsi Untuk Lokasi Bantuan Stimulan
 Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK)
 TA

Dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di lokasi..... kabupaten/kota dan sesuai dengan Program Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK) yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran, bersama ini dengan hormat kami sampaikan lokasi kabupaten/kota yang diusulkan sebagai lokasi BSPK, sebagai berikut:

- a. Penanganan pada Tahun Anggaran
 - Lokasi di Kabupaten/Kota
 - Lokasi di Kabupaten/Kota
- b. Penanganan pada Tahun Anggaran selanjutnya
 - Lokasi di Kabupaten/Kota
 - Lokasi di Kabupaten/Kota

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

- Usulan lokasi pemerintah kabupaten/kota
- Kuesioner dan data pendukung pemerintah kabupaten/kota

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gubernur

.....

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat;
2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Walikota/Bupati
5. Arsiparis.

FORM B

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.

Gubernur.....

di -

.....

Perihal : Usulan Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Lokasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK) TA

Dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di lokasi..... kabupaten/kota dan sesuai dengan Program Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK) yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran, maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan lokasi BSPK di kabupaten/kota pada tahun anggaran sebagai berikut:

- Lokasi
- Lokasi
- Lokasi

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

- Usulan lokasi pemerintah kabupaten/kota
- Kuesioner
- Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota
- Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Surat Pernyataan Bupati/Walikota tentang kesediaan bekerjasama pada pelaksanaan kegiatan BSPK
- Peta lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- Foto-foto dan data pendukung lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bupati/Walikota

.....

Tembusan:

1. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat;
2. Arsiparis.

FORM C

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Bentuk/struktur penulisan surat keputusan penetapan lokasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar disesuaikan dengan format yang berlaku di daerah. Namun demikian, dalam penulisan surat keputusan tersebut perlu ditampung materi-materi pokok sebagai berikut:

- Alasan pemilihan lokasi
- Ketersediaan pengalokasian dana APBD
- Ketersediaan memfasilitasi dan penyiapan rencana dan program yang mendukung kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Berikut di bawah ini adalah contoh surat keputusan bupati/walikota yang mengakomodasi materi pokok di atas:

KEPUTUSAN

BUPATI/WALIKOTA

NOMOR : / /.....

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DI KABUPATEN/KOTA

Menimbang : dst (bentuk surat keputusan disesuaikan dengan model surat keputusan yang berlaku di daerah), sebagai contoh:

- a. bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. bahwa di kabupaten/kota masih terdapat perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang kualitasnya semakin menurun dan perlu segera ditangani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota.....
- e. dst

- Mengingat** : dst, sebagai contoh:
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor: 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3699);
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
 - e. dst.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : dst, sebagai contoh:
 “KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA.....”

Kesatu : Lokasi-lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan lokasi yang benar-benar kumuh dan memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman tersebut;

Kedua : Pemerintah Kabupaten/Kotabersedia mengalokasikan dana APBD untuk kelancaran pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan mulai tahun anggaran sampai dengan tuntasnya penanganan;

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten/Kota..... Tahun Anggaran

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

dan seterusnya....

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Bupati/Walikota

.....

Lampiran Keputusan Bupati/Walikota

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota
.....

No	Lokasi	Luas (Ha)	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Bupati/Walikota

.....

FORM D**KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

Bentuk/struktur penulisan surat pernyataan agar disesuaikan dengan format yang berlaku di daerah. Namun demikian, dalam surat pernyataan tersebut perlu ditampung materi-materi pokok sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN**KESEDIAAN KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (BSPK)**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK) yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran, maka bersama ini kami Pemerintah Kabupaten/Kota..... menyatakan:

1. Memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan BSPK;
2. Menetapkan lokasi penanganan sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui surat keputusan kepala daerah;
3. Bersedia untuk mengalokasikan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD kota/kabupaten..... dalam rangka sinergi dan saling menunjang kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas;
4. Melaksanakan perekrutan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM);
5. Bersama dengan TPM memfasilitasi pelaksanaan BSPK;
6. Mengusulkan aparat pemerintah kota/kabupaten sebagai anggota Tim Koordinasi BSPK;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara bersinergi dengan Kementerian Perumahan Rakyat dalam pelaksanaan BSPK;
8. Bersedia melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan BSPK.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Bupati/Walikota

.....

FORM E**KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

Bentuk/struktur penulisan surat pernyataan agar disesuaikan dengan format yang berlaku di daerah. Namun demikian, dalam surat pernyataan tersebut perlu ditampung materi-materi pokok sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN**KESIAPAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN FISIK PSU BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran, maka bersama ini kami Pemerintah Kabupaten/Kota..... menyatakan bahwa

1. Lahan yang menjadi lokasi pembangunan fisik PSU BSPK siap untuk dibangun (*clean and clear*) dan tidak bermasalah dengan masyarakat atau yang lainnya (terlampir surat hibah/kepemilikan lahan).
2. Jika di kemudian hari terjadi permasalahan lahan di lokasi dimaksud, maka kami bersedia untuk dibatalkan kegiatan BSPK.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Bupati/Walikota

.....

**MENTERI PERUMAHAN RAKYAT,
REPUBLIC INDONESIA**

DJAN FARIDZ